



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1442-1457

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Zulfa Ma'arij<sup>1✉</sup>, Millona Virgina Keni<sup>2</sup>, Wahyuni Cintya Dewi<sup>3</sup>, Monica Intan Larasati<sup>4</sup>,

Hafidz Rachmad Hidayatullah<sup>5</sup>

Universitas Negeri Surabaya

Email: [zulfa.23051@mhs.unesa.ac.id](mailto:zulfa.23051@mhs.unesa.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dijalankan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat, efektivitas pengelolaan anggaran menjadi hal yang krusial. Namun, temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya tingkat penyerapan dana. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali secara mendalam kendala dan praktik dalam implementasi anggaran berbasis akrual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tantangan terbesar berasal dari kurangnya kapasitas sumber daya manusia, perencanaan yang tidak tepat sasaran, serta sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meski demikian, penerapan sistem e-budgeting dan keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan menjadi langkah positif yang mulai diterapkan.

Kata Kunci: *Penyusunan Anggaran, Realisasi Anggaran, Dinas Sosial, Jawa Timur*

## Abstract

This study aims to analyze how the budget preparation process and budget realization reporting are carried out at the East Java Provincial Social Service. As an institution responsible for implementing community welfare programs, the effectiveness of budget management is crucial. However, findings from the Audit Board of Indonesia show that there is still a mismatch between budget planning and implementation, as well as a low level of fund absorption. Using a qualitative approach, this study collected data through interviews, observations, and documentation to explore in depth the obstacles and practices in implementing accrual-based budgeting. The results of the study explain that the biggest challenges come from the lack of human resource capacity, inappropriate planning, and a reporting system that is not yet fully integrated. However, the implementation of the e-budgeting system and the involvement of various parties in planning are positive steps that are starting to be implemented.

*Keywords: Budget Preparation, Budget Realization, Social Service, East Java*

## PENDAHULUAN

Penyusunan dan pelaporan anggaran merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik, karena tidak hanya sebagai alat perencanaan dan kontrol, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2019). Menurut Anthony dan Young (2003), anggaran juga berfungsi sebagai sarana penerjemahan kebijakan publik ke dalam program dan aktivitas yang terukur. Hal ini menuntut partisipasi aktif berbagai pihak untuk memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan.

Di Indonesia, regulasi penyusunan anggaran diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik. Halim (2004) menambahkan bahwa anggaran daerah yang baik ditandai dengan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Namun, dalam praktiknya, seperti dikemukakan oleh Bastian (2015), masih banyak instansi yang menghadapi tantangan dalam efektivitas penyusunan dan pelaporan anggaran, akibat lemahnya kontrol internal dan kapasitas teknis aparatur (Harun & Kamase, 2012).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang memiliki tanggung jawab strategis atas program kesejahteraan sosial, menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan laporan BPK (2022), terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta penyerapan anggaran yang rendah. Ini sejalan dengan pernyataan Mahmudi (2016) bahwa keberhasilan implementasi anggaran sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan koordinasi lembaga.

Septyanto et al. (2020) menemukan bahwa anggaran dinas sosial di beberapa daerah belum berbasis kinerja, sehingga hasil program tidak optimal. Agustina dan Rokhimah (2021) juga menyoroti lemahnya kontrol internal dan SDM sebagai penghambat pelaporan keuangan, diperkuat oleh Arifin (2018) yang menyatakan bahwa profesionalisme dan teknologi informasi adalah kunci akuntabilitas publik.

Penelitian ini menggunakan landasan teori akuntansi sektor publik, khususnya prinsip *value for money* (Jones & Pendlebury, 2010), yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran. Konsep *New Public Management* (Hood, 1995) juga diadopsi untuk mendorong penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan transparansi.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penyusunan dan pelaporan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi praktis untuk peningkatan tata kelola keuangan publik, serta memperkaya literatur akademis dan mendorong perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis kinerja di tingkat daerah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan dan pelaporan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan dinamika sosial secara holistik, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2005), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada makna dan konteks fenomena yang diteliti.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat pengelola keuangan dan staf penyusun anggaran di Dinas Sosial. Teknik ini sejalan dengan studi yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang juga menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumen resmi sebagai sumber utama data.

Dalam konteks penerapan SAP berbasis akrual, aspek penting yang dikaji meliputi kesiapan sistem akuntansi, pelatihan SDM, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Purwaji, Wibowo, dan Murtanto (2016), keberhasilan implementasi SAP tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kapasitas SDM dan teknologi informasi yang memadai.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1994), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus menerus hingga data mencapai saturasi. Proses ini membantu peneliti dalam menyusun pola-pola penting dan menarik kesimpulan yang kontekstual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini juga memeriksa kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Tingkat kepatuhan menjadi indikator keberhasilan implementasi, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diusung dalam teori akuntansi sektor publik.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi SAP berbasis akrual, termasuk manfaat, hambatan, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Seperti disampaikan oleh Bastian (2015), pengelolaan keuangan daerah yang baik memerlukan sistem pelaporan yang akurat dan berbasis kinerja agar tercipta tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Penyusunan Anggaran

#### a. Langkah-langkah dalam Penyusunan Anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Penyusunan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan pemerintah. Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan evaluasi program tahun sebelumnya guna menentukan prioritas kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disusun rencana kerja yang selaras dengan prioritas pembangunan sosial dan masukan dari pemangku kepentingan. Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mencakup rincian program, target, serta kebutuhan anggaran. RKA yang telah disusun dibahas secara internal, lalu dikonsultasikan dengan Bappeda dan instansi terkait sebelum diajukan ke DPRD. Dalam proses pembahasan di DPRD, RKA dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan daerah dan kemampuan fiskal. Setelah disetujui, RKA menjadi bagian dari APBD yang kemudian ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024).2024; Sadewo & Muljanto, 2023).

#### b. Keterlibatan Stakeholder dalam Proses Perencanaan Anggaran

Dalam proses perencanaan anggaran, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melibatkan berbagai stakeholder, seperti pejabat Dinas Sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lembaga kesejahteraan sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Keterlibatan ini diwujudkan melalui forum koordinasi teknis (rakortek), focus group discussion (FGD), dan konsultasi publik. Melalui forum-forum tersebut, para stakeholder dapat memberikan masukan terkait kebutuhan, evaluasi program sebelumnya, serta usulan prioritas anggaran untuk tahun berikutnya. Partisipasi aktif stakeholder sangat penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial (Cakrawala Journal, 2023; Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024).

#### c. Mekanisme Alokasi Dana untuk Program dan Kegiatan Sosial

Alokasi dana untuk program dan kegiatan sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bersumber utama dari APBD. Penetapan alokasi dana dilakukan berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan, seperti bantuan permakanan anak terlantar, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, serta program pengentasan kemiskinan lainnya. Selain itu, terdapat sumber dana khusus seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan untuk mendukung program tertentu. Setiap alokasi dana dirancang agar tepat sasaran dan efektif, serta diawasi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Transparansi dalam pengelolaan dana juga dijaga melalui pembahasan di forum teknis dan pelaporan yang terbuka kepada publik (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024; Angin, 2014).

#### d. Tantangan yang Dihadapi dalam Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada cakupan monitoring dan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi kendala karena anggaran yang tersedia sering kali belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program sosial. Tantangan lain adalah kurangnya data terpilah, seperti data berbasis gender dan kelompok rentan, sehingga perencanaan anggaran belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hambatan birokrasi dan koordinasi antarinstansi juga kerap memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas Sosial berupaya memperkuat sinergi dengan pilar-pilar sosial seperti Taruna Siaga Bencana, karang taruna,

dan pendamping PKH guna meningkatkan efektivitas implementasi program di lapangan (Sadewo & Muljanto, 2023; Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024).

## 2. Realisasi Anggaran

### a. Tingkat Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Target yang telah ditetapkan

Tingkat realisasi anggaran merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran di sebuah instansi pemerintah, termasuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Realisasi anggaran dihitung sebagai persentase dari dana yang telah digunakan dibandingkan dengan total anggaran yang telah disetujui dan ditargetkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

- Pentingnya Target Realisasi. Target realisasi anggaran ditetapkan berdasarkan kebutuhan program dan prioritas pembangunan sosial di Jawa Timur, harus realistis agar program berjalan sesuai rencana dan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- Interpretasi Tingkat Realisasi. Realisasi anggaran  $\geq 90\%$  menunjukkan pengelolaan dana yang efektif dan efisien, namun realisasi tinggi di akhir tahun bisa menandakan penyerapan dana terburu-buru sehingga menurunkan kualitas program. Realisasi  $< 80\%$  perlu diwaspadai karena menunjukkan hambatan pelaksanaan atau perencanaan kurang tepat.
- Dampak Perbedaan Realisasi dan Target/ Perbedaan signifikan antara realisasi dan target dapat mengakibatkan program kurang optimal, sisa anggaran tidak terserap, atau pemborosan. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi berkala sangat penting agar realisasi anggaran tetap sesuai target.

### b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempercepat atau menghambat proses penggunaan dana.

- Faktor Internal
  - a) Perencanaan yang Kurang Matang: Ketidaksesuaian antara kebutuhan riil di lapangan dengan anggaran yang disusun dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana. Perencanaan yang kurang detail atau tidak berdasarkan data valid sering mengakibatkan anggaran tidak terserap maksimal.
  - b) Kapasitas SDM: Keterbatasan tenaga ahli dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program sosial dapat memperlambat proses administrasi dan

pelaksanaan kegiatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan.

c) Proses Birokrasi: Prosedur pengadaan barang dan jasa yang rumit dan lambat dapat menghambat realisasi anggaran, terutama jika tidak didukung oleh sistem yang efektif dan transparan.

- Faktor Eksternal

a) Kondisi Sosial dan Ekonomi: Perubahan mendadak seperti bencana alam, pandemi, atau kondisi sosial yang tidak stabil dapat mengubah prioritas penggunaan anggaran dan menghambat pelaksanaan program.

b) Peraturan dan Kebijakan Pemerintah: Perubahan regulasi dari pemerintah pusat atau daerah dapat mempengaruhi mekanisme penggunaan anggaran, misalnya adanya pembatasan penggunaan dana tertentu.

c) Partisipasi Masyarakat: Dukungan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program sosial. Kurangnya partisipasi dapat menyebabkan program tidak tepat sasaran dan berdampak pada realisasi anggaran.

c. Kualitas Pelaporan Realisasi Anggaran dan Transparansi dalam Penggunaan Dana

Pelaporan realisasi anggaran adalah proses dokumentasi dan pelaporan penggunaan dana yang telah dilakukan selama periode tertentu. Kualitas pelaporan dan transparansi menjadi aspek krusial dalam tata kelola keuangan pemerintah yang baik.

- Kualitas Pelaporan

Laporan realisasi anggaran harus disusun secara akurat, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan membantu mempercepat proses pelaporan dan mengurangi kesalahan. Laporan juga harus memuat informasi detail mengenai realisasi per kegiatan, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan. Hal ini penting untuk evaluasi dan pengambilan keputusan di masa depan.

- Transparansi dalam Penggunaan Dana

Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan transparansi dengan:

- a) Memublikasikan laporan realisasi anggaran secara terbuka melalui website resmi atau media publik lainnya.
- b) Melibatkan masyarakat dan lembaga pengawas dalam proses pengawasan penggunaan dana.
- c) Melaksanakan audit internal secara rutin dan mendukung audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akuntabilitas.
- d) Menyediakan mekanisme pengaduan dan feedback dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Dengan kualitas pelaporan yang baik dan transparansi yang tinggi, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial dapat meningkat.

### 3. Efektivitas Proses Penyusunan Anggaran

- a. Analisis efektivitas langkah-langkah perencanaan anggaran dalam mencapai tujuan program sosial.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem e-budgeting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran. Sistem ini memfasilitasi sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara real-time. Namun, tantangan masih ada dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, terutama dalam memastikan bahwa alokasi dana benar-benar mencapai sasaran program sosial yang ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada beberapa program masih belum optimal, dengan beberapa kegiatan mengalami penundaan atau tidak terlaksana sesuai rencana (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk memastikan pencapaian tujuan program sosial secara efektif.

- b. Perbandingan dengan teori dan praktik terbaik dalam perencanaan anggaran sektor publik.

Dalam teori anggaran sektor publik, pendekatan seperti *Performance-Based Budgeting* (PBB) dan *Zero-Based Budgeting* (ZBB) dianggap sebagai praktik terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. PBB menekankan pada pencapaian hasil dan kinerja program, sementara ZBB mengharuskan setiap unit kerja untuk membenarkan seluruh anggarannya dari nol setiap periode anggaran (Mardiasmo, 2009).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip PBB dalam perencanaan anggarannya, dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap program. Namun, implementasi penuh dari pendekatan ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung (Verasvera, 2016). Penerapan ZBB belum sepenuhnya dilakukan, yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi anggaran di masa mendatang.

c. Implikasi dari keterlibatan stakeholders terhadap keberhasilan program.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa program sosial yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memberikan masukan yang berharga dalam merancang program yang lebih responsif dan tepat sasaran (Tamrin & Liliana, 2023). Di Provinsi Jawa Timur, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi stakeholders, seperti forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) (Kominfo Jatim, 2024). Namun, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa partisipasi tersebut bersifat inklusif dan representatif, serta bahwa masukan dari stakeholders benar-benar diintegrasikan dalam perencanaan anggaran.

4. Faktor Penghambat Realisasi Anggaran

a. Diskusi mendalam tentang hambatan yang ditemukan dan dampaknya terhadap kinerja program.

- Perencanaan yang Tidak Matang

Perencanaan anggaran yang kurang matang sering menjadi hambatan utama dalam realisasi anggaran di sektor publik. Ketidaktepatan dalam merumuskan kebutuhan, estimasi biaya, dan jadwal pelaksanaan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya dan penundaan dalam pelaksanaan program. Studi oleh Nur Alim Bahri dan Puspita Hardianti Anwar (2019) menunjukkan bahwa perencanaan yang tidak tepat dapat menghambat efektivitas realisasi anggaran sektor publik. Selain itu, perencanaan yang tidak matang juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai, sehingga menurunkan kualitas layanan publik.

- Keterlambatan dalam Proses Pengadaan  
Proses pengadaan barang dan jasa yang lambat atau gagal tender dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target. Faktor-faktor seperti kurangnya perencanaan yang matang, birokrasi yang rumit, dan praktik korupsi dapat memperlambat proses pengadaan. Pengadaan Indonesia (2023) menyebutkan bahwa lambatnya proses pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan dalam regulasi dan prosedur pengadaan juga dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengadaan.
  - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas program. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya motivasi dapat mempengaruhi kinerja SDM dalam pengelolaan anggaran. Seputar Birokrasi (2023) menyebutkan bahwa kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dapat menyebabkan kesalahan administratif atau teknis yang berdampak pada kelancaran pengadaan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SDM juga dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
- b. Perbandingan dengan studi serupa untuk mengidentifikasi pola atau keunikan kasus.
- Pola Umum dalam Hambatan Realisasi Anggaran  
Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa hambatan dalam realisasi anggaran cenderung memiliki pola yang serupa. Di Provinsi Riau, Andri et al. (2019) menemukan bahwa rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta faktor administratif seperti lambatnya pengesahan APBD dan perpindahan pejabat. Sementara itu, Putri dan Ratminto (2023) dalam penelitiannya di Aceh mengidentifikasi kendala serupa, termasuk lemahnya administrasi, keterlambatan pengadaan, serta kurangnya keterampilan dalam pelaporan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala dalam realisasi anggaran bersifat umum di berbagai daerah dan menuntut perbaikan sistemik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.

- Keunikan Kasus di Jawa Timur: Implementasi e-Budgeting  
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem *e-budgeting* sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, tantangan tetap muncul, terutama dalam hal integrasi data dan koordinasi antarunit kerja. Wahyulita (2019) mencatat bahwa hambatan teknis dan koordinatif menjadi kendala utama dalam implementasi *e-budgeting*. Temuan ini diperkuat oleh Sitepu et al. (2024), yang menyebutkan bahwa faktor eksternal seperti kekhawatiran terhadap tindakan hukum dari Aparat Penegak Hukum (APH), serta faktor internal seperti lemahnya perencanaan dan administrasi, turut memengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu, meskipun *e-budgeting* mendorong transparansi, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan sistem, koordinasi, dan dukungan SDM yang memadai.

## 5. Kualitas Pelaporan dan Transparansi

### a. Evaluasi kualitas laporan realisasi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas

Pelaporan realisasi anggaran merupakan elemen kunci dalam manajemen keuangan publik karena berfungsi menilai akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pemerintah. Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun setiap triwulan dan akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan auditor eksternal seperti BPK, serta dipublikasikan secara daring untuk mendukung transparansi. Namun, laporan yang disajikan masih bersifat formalistik dan kurang evaluatif terhadap capaian fisik maupun dampak program sosial. Selain itu, belum terintegrasinya sistem pelaporan dengan platform e-Planning, e-Budgeting, dan SIMDA menghambat pelacakan anggaran secara real-time dan menyulitkan penyusunan laporan yang cepat, akurat, dan berbasis data aktual untuk pengambilan keputusan yang responsif.

### b. Rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan anggaran lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem pelaporan serta mendorong penguatan tata kelola keuangan yang baik. Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran yang dapat diterapkan antara lain, yaitu:

- Laporan realisasi anggaran sebaiknya disertai dengan narasi analitis yang memuat capaian kinerja fisik, indikator keberhasilan program, hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta strategi tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul. Penyajian informasi secara komprehensif ini tidak hanya mendukung proses audit, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja dan dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran perlu menjadi prioritas. Aparatur yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual akan mampu menyusun laporan keuangan yang terintegrasi dengan hasil kinerja. Program pelatihan teknis, workshop, serta pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan yang berkualitas.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah, seperti SIMDA, e-Budgeting, dan e-Monev, harus terus ditingkatkan. Integrasi antar sistem informasi keuangan akan mempercepat proses pelaporan, meningkatkan validitas data, serta memperkuat fungsi pengawasan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga seperti BPK dan Inspektorat.
- Perlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi anggaran perlu diperkuat melalui mekanisme konsultasi publik maupun penyediaan media pelaporan yang interaktif dan berbasis digital. Partisipasi publik merupakan bentuk pengawasan sosial yang dapat mendorong peningkatan transparansi dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

## 6. Rekomendasi Perbaikan

- a. Saran praktis untuk memperbaiki proses penyusunan dan realisasi anggaran berdasarkan temuan penelitian
  - Peningkatan kapasitas SDM secara sistemik melalui pelatihan berkelanjutan tentang perencanaan berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pelatihan ini mencakup analisis kebutuhan, proyeksi output-outcome, dan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur. Mahmudi (2016) menekankan bahwa pemahaman terhadap penganggaran berbasis output sangat penting untuk efisiensi alokasi anggaran.

- Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang menggabungkan data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi lebih akurat, cepat, dan responsif. Sistem seperti SIPD atau e-Planning harus bersifat tidak hanya administratif tetapi juga analitis untuk mendukung rekomendasi berbasis data.
- Penerapan evaluasi berbasis kinerja secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang tidak hanya melihat realisasi keuangan tetapi juga pencapaian output dan outcome. Evaluasi triwulan memudahkan pengambil kebijakan melakukan koreksi dini agar efisiensi dan efektivitas anggaran terjamin.

b. Strategi untuk meningkatkan partisipasi stakeholders dan efisiensi alokasi dana

Partisipasi stakeholders dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masih terbatas pada birokrasi internal, sehingga perlu diperluas melalui mekanisme participatory budgeting seperti Musrenbang dan kanal digital agar kebutuhan masyarakat teridentifikasi dengan lebih tepat dan perencanaan lebih inklusif. Efisiensi anggaran harus fokus pada hasil (output dan outcome) melalui evaluasi berkala dan penganggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan lewat aplikasi pengaduan publik dan kanal komunikasi daring. Selain itu, kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat penting untuk memperkuat pengawasan sosial, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat dan efektif demi kepentingan masyarakat.

c. Langkah-langkah untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan realisasi anggaran

Dalam Instansi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sistem Monev yang ada masih menghadapi kendala teknis dan substantif. Berikut langkah-langkah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan realisasi anggaran, yaitu:

- Penguatan Sistem Monev Digital, optimalisasi Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) di Pemprov Jawa Timur perlu ditingkatkan agar menghubungkan indikator kinerja dengan realisasi fisik dan keuangan secara real-time. Digitalisasi ini meningkatkan transparansi dan akses publik sesuai prinsip keterbukaan informasi (Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024).
- Peran Inspektorat Daerah, Inspektorat harus diperkuat sebagai pengawas internal yang tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tapi juga berperan sebagai mitra

konsultatif untuk membina dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di OPD, agar pengawasan lebih bersifat pembinaan, bukan represif.

- Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan. Ketiga sistem tersebut harus diintegrasikan dalam satu siklus yang saling terhubung untuk menciptakan alur kebijakan konsisten, memperkuat penggunaan evaluasi dalam perencanaan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menghindari sikap administratif semata.
- Evaluasi Triwulanan Berbasis IKU. Evaluasi harus dilakukan triwulanan dengan indikator kinerja utama (IKU), sebagai early warning system untuk mendeteksi kegagalan program secara dini dan melakukan perbaikan cepat, serta dikaitkan dengan sistem reward and punishment bagi pelaksana program.

## 7. Limitasi Penelitian

- a. Pengakuan terhadap keterbatasan penelitian, seperti jangkauan data atau waktu penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada ruang lingkup yang terbatas hanya pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke instansi pemerintah lain. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menghambat pendalaman terhadap dinamika pengelolaan anggaran secara menyeluruh, terutama dalam memahami perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas objek dan memperpanjang durasi studi untuk hasil yang lebih komprehensif.

- b. Implikasi keterbatasan tersebut terhadap generalisasi hasil penelitian

Keterbatasan penelitian ini, seperti fokus yang sempit pada satu instansi dan waktu yang terbatas, berpotensi memengaruhi generalisasi hasil. Temuan mungkin tidak sepenuhnya mewakili praktik di instansi lain yang memiliki konteks dan tantangan berbeda. Oleh karena itu, hasil dan rekomendasi perlu ditafsirkan secara kontekstual. Penelitian lanjutan yang mencakup lebih banyak instansi dan periode waktu yang lebih panjang sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendukung kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif di berbagai tingkatan pemerintahan.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji proses penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada tantangan dan upaya perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instansi tersebut telah menerapkan sistem e-budgeting dan melibatkan berbagai stakeholder dalam perencanaan, masih terdapat sejumlah kendala signifikan. Kapasitas SDM yang terbatas, perencanaan yang kurang tepat sasaran, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara optimal menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta rendahnya tingkat penyerapan dana. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta penerapan evaluasi berbasis kinerja secara berkala. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan menyajikan laporan yang lebih analitis. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program kesejahteraan sosial serta memperkuat tata kelola keuangan publik secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin LPKN. (2023, May 13). Pentingnya Mengatasi Lambatnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Pengadaan Indonesia. *Pengadaan Indonesia*.  
<https://pengadaan.or.id/2023/05/13/pentingnya-mengatasi-lambatnya-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/>
- Agustina, D., & Rokhimah, S. (2021). Analisis faktor penghambat pelaporan realisasi anggaran pada dinas sosial kabupaten. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 45-60.
- Angin. (2014). Anggaran mensejahterakan: problem dalam formulasi. *Metafora*, 51. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/metafora/article/download/10688/4503>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2022). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021. BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
- Bahri, N., & Anwar, P. (2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 70 (p. Vol. IV No. 1).
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi 4). Erlangga.
- Cakrawala Journal. (2023). Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan. Retrieved from <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/537/pdf>
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (2024). *Perencanaan Anggaran*. Retrieved from

<http://www.dinsos.jatimprov.go.id/menu/perencanaan-anggaran>

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (2024). Undang 38 Dinsos Kabupaten/Kota, Dinsos Jatim Gelar Rakortek Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial. Retrieved from <https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/undang-38-dinsos-kabupatenkota-dinsos-jatim-gelar-rakortek-pelaksanaan-program-kesejahteraan-sosial>
- Hood, C. (1995). The "New Public Management" in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2-3), 93-109.
- Humas Seputar Birokrasi. (2025, January 8). Penyebab Sistem Pengadaan Barang Pemerintah Sering Bermasalah - Seputar Birokrasi. Seputar Birokrasi. <https://seputarbirokrasi.com/penyebab-sistem-pengadaan-barang-pemerintah-sering-bermasalah/>
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public sector accounting* (6th ed.). Pearson Education.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Pemkab Mojokerto. (2019). Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Pembangunan, Pemkab Mojokerto Gelar Musrenbang RKPD 2026. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tingkatkan-partisipasi-masyarakat-dalam-rencana-pembangunan-pemkab-mojokerto-gelar-musrenbang-rkpd-2026>
- Sadewo, S., & Muljanto, M. A. (2023). Manajemen Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam ... *Prediksi*, 22(3), 265-274. Retrieved from <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/PD/article/download/7512/pdf>
- Septyanto, D., Sari, R. N., & Wahyuni, S. (2020). Evaluasi penyusunan anggaran berbasis kinerja pada dinas sosial provinsi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 78-92.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Verasvera, F. A. (2009, June 12). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/2d520b19-aea9-4516-a63e-6ec92cb65c1f/content>.